

Dr. Jan. S. Marinka

REFORMASI KEJAKSAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

Kata Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia	v
Kata Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia	vii
Prakata	ix
Bab 1 Penegakan Hukum di Indonesia	1
A. Wajah Penegakan Hukum Indonesia Saat ini	1
1. Problematika Penegakan Hukum	3
2. Penegak Hukum dan Korupsi	6
B. Penegakan Hukum Bukanlah Sebuah Industri	9
C. Paradigma Kekuasaan dalam Penegakan Hukum	14
Bab 2 Penguatan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan	20
A. Penuntutan dan Kekuasaan di Indonesia	21
B. Konsepsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI	26
1. Menggugat Kemandirian Kejaksaan	28
2. Kejaksaan sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.. ..	30
3. Penegasan Konstitusi tentang Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan	34
Bab 3 Penguatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	39
A. Mewujudkan <i>Single Prosecution System</i>	39
1. Penerapan Asas <i>Single Prosecution System</i> di Indonesia	40

2.	Sinergitas Fungsi Penyidikan dan Penuntutan	44
3.	Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan	46
4.	Kesatuan Kebijakan Penuntutan di Bawah Jaksa Agung	49
B.	Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia	52
1.	Kejaksaan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	52
2.	Menggugat Dualisme Penuntutan	55

BAB 4 PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA 61

A.	Kejahatan yang Berkaitan dengan Yurisdiksi Asing menjadi Penghambat Upaya Penegakan Hukum	61
B.	Strategi dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara ..	62
1.	Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum	63
2.	Perkembangan Internasional di Bidang Kerja Sama Penegakan Hukum	66
C.	Kebijakan <i>Central Authority</i> PBB	76

BAB 5 REFORMASI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG MODERN 86

A.	Membangun Kejaksaan sebagai Penegak Hukum Modern	86
1.	Dasar Pijakan Penguatan Kejaksaan	87
2.	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kejaksaan yang Diharapkan	92
B.	Hambatan dalam Mereformasi Kejaksaan	97
1.	Problematisasi Anggaran Berbasis Kinerja	97
2.	Peluang dan Kendala secara Umum	103



C. Kebijakan, Strategi, dan Upaya dalam Reformasi Kejaksaan dan Hukum secara Keseluruhan	101
1. Kebijakan	105
2. Strategi	105
3. Upaya-Upaya	109

BAB 6 PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA MARITIM 124

A. Problematika Kondisi Wilayah	126
B. Problematika Kondisi Riil	129
1. Problematika Anggaran	129
2. Kelembagaan	130
3. Penanganan Perkara	131
4. Integritas dan Akuntabilitas	132
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia	133
C. Konsolidasi, Optimalisasi, dan <i>Public Trust</i>	134
1. Bidang Pembinaan	134
2. Bidang Intelijen	138
3. Pidum	141
4. Pidsus	143
5. Datun	144
6. Pengawasan	145
7. Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia	146

BAB 7 REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN 149

A. Refleksi Singkat Posisi Kejaksaan dalam Sistem Keratanegaraan	150
B. Refleksi Singkat <i>Single Prosecution System</i>	154
C. Refleksi Singkat Otoritas Pusat bagi Kejahatan Lintas Negara	155

D. Refleksi Singkat Penguatan Kejaksaan secara Kelembagaan	157
---	-----

DAFTAR PUSTAKA	161
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	167
-----------------------	------------

PROFIL PENULIS	229
-----------------------------	------------